



# PDRB KOTA MANADO MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2010-2014



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA MANADO  
MENURUT PENGELUARAN**

**2010 - 2014**

<http://manadokota.ms.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA MANADO  
MENURUT PENGELUARAN 2010 - 2014**

ISSN :  
Nomor Publikasi : 71550.1507  
Katalog BPS : 9302002.71

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : viii + 53 halaman

Naskah:  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit:  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis

Diterbitkan Oleh:  
Badan Pusat Statistik Kota Manado

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://manadokota.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA MANADO  
MENURUT PENGELUARAN 2010- 2014**

---

**Anggota Tim Penyusun:**

Pengarah : Ir. Jefry J. Runtulalo, MM

Penulis : Carlos E. Siburian, SST

<http://manadokota.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat peredaran uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini merupakan publikasi pertama yang menyajikan data PDRB Tahun Dasar Baru (2010=100), dan sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah).

Kepada penyusun publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Manado, September 2015  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MANADO,

**Ir. Jefry J. Runtulalo, MM**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	v
<b>Daftar Lampiran</b> .....	viii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	2
1.2 Kegunaan Statistik PDRB .....	4
<b>BAB II Metode Estimasi dan Sumber Data</b> .....	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRIT .....	10
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	13
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	16
2.5 Perubahan Inventori .....	20
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa .....	24
<b>BAB III Tinjauan Ekonomi Menurut PDRB Pengeluaran Kota Manado</b> .....	26
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Pengeluaran Kota Manado .....	27
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	31
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRIT .....	35
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah .....	36
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	38
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori .....	40

3.7 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah .....	41
<b>BAB IV Penutup</b> .....	44
<b>Lampiran</b> .....	47
<b>Daftar Pustaka</b> .....	52

<http://manadokota.bps.go.id>

---

**DAFTAR TABEL**

		Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2010-2014.....	27
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2010-2014.....	28
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2010-2014.....	29
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran 2010-2014.....	30
Tabel 5	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2010-2014.....	31
Tabel 6	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2010-2014.....	33
Tabel 7	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2010-2014.....	34
Tabel 8	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRIT, 2010-2014 .....	35
Tabel 9	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 2010-2014.....	36
Tabel 10	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 2010-2014.....	37
Tabel 11	Perkembangan dan Struktur PMTB .....	38
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori 2010-2014.....	40
Tabel 13	Perkembangan Ekspor 2010-2014.....	42
Tabel 14	Perkembangan Impor Luar 2010-2014.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, Menurut Pengeluaran, Kota Manado (Miliar Rp).....	71
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Pengeluaran (Miliar Rp) .....	72
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, Menurut Pengeluaran Kota Manado (Persen) .....	73
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Pengeluaran Kota Manado (Persen) .....	74
Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Manado .....	75
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100), Menurut Pengeluaran Kota Manado .....	76

## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

### a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. **Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

## 1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah/*region* setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu *region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu *region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu *region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

## 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

### i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

### ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol;
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik;
3. Pakaian dan alas kaki;
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya;
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin;
6. Kesehatan;
7. Angkutan;
8. Komunikasi;
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan;
10. Pendidikan;
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel;
12. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok;
2. Pakaian dan Alas Kaki;
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga;
4. Kesehatan dan Pendidikan;
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya;
6. Hotel dan Restoran;
7. Lainnya;

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);  
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut).
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya, diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

#### iv. Penghitungan PKRT Tahunan

##### 1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PK-RT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

##### 2. Metode penghitungan

Penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Susenas. Untuk menghasilkan penghitungan PK-RT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PK-RT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
  - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x  $(30/7)$  x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
  - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

2. Terhadap data poin ke-1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke-2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PK-RT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PK-RT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

<http://manadokota.bps.go.id>



## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

### i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *non profit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara;

Contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

b. Kompensasi tenaga kerja;

Contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya

c. Penyusutan;

d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

### iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

#### 1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

#### 2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$ : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$x_{ij}$  : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

$i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

$j$  : Jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

$X$  : PK-LNPRT adh Berlaku

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir, sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi (pendapatan jasa).

### iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

### iv. Penghitungan PDRB Tahunan

#### 1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

#### 2. Metode Penghitungan

##### a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

**Output non pasar** dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota

yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

**b. PK-P Provinsi adh Konstan**

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

<http://manadokota.bps.go.id>

## 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

### ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya, sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

### iii Cakupan

#### **PMTB terdiri dari :**

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

- Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

#### iv Penghitungan PMTB Tahunan

##### 1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota;
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat;
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi);
- d. Laporan keuangan perusahaan;
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang Level Provinsi;
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar;
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas);
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum;
- i. Publikasi Statistik Konstruksi;
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

##### 2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung, sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).



### **Pendekatan Langsung**

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

### **Pendekatan Tidak Langsung**

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara:

*Pertama*, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

*Kedua*, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikasikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di-*inflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang

sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara: *Pertama*, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Untuk PMTB adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat, sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI

### i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

#### 1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

## 2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

### Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia.

Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan:

- a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai,
- b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen perubahan inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

<http://manadokota.bps.go.id>

## 2.6. EKSPOR IMPOR

### i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non residen yang berada di luar wilayah tersebut.

### iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
  - Ekspor antar daerah
  - Impor antar daerah

### iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

#### 1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);

- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei;
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

## 2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang, sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen, sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



### 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA MANADO

Perubahan struktur ekonomi Kota Manado akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode tahun 2010-2014, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Manado digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Kondisi perekonomian Kota Manado menunjukkan perkembangan positif, meskipun masa krisis telah melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Pengeluaran, 2010 - 2014**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.612	7.323	8.194	8.920	9.937
2. Konsumsi LNPRT	273	284	299	336	352
3. Konsumsi Pemerintah	2.003	2.458	2.813	3.352	3.877
4. PMTB	5.782	6.379	6.736	7.266	7.987
5. Perubahan Inventori	5,92	11,35	41,70	112,69	320,08
6. Net Ekspor Antar Daerah	-598	-603	-340	-115	-29
<b>Total PDRB</b>	<b>14.078</b>	<b>15.852</b>	<b>17.744</b>	<b>19.871</b>	<b>22.444</b>

Nilai PDRB Kota Manado (adh Berlaku) selama periode tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB pada masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

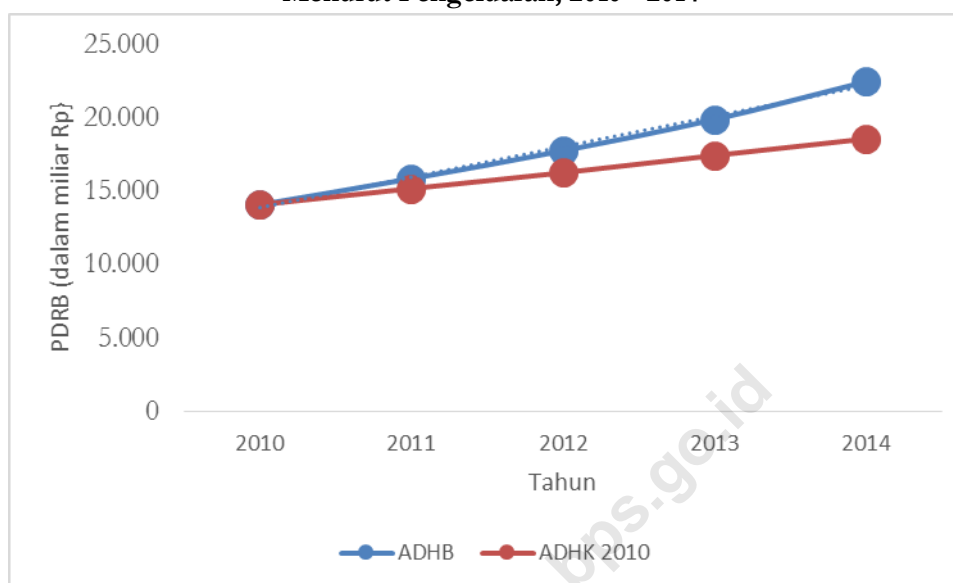
PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Manado berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

**Tabel 2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Pengeluaran, 2010 - 2014**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2010	2011	2012	2013	2104
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.612	7.047	7.487	8.016	8.561
2. Konsumsi LNPRIT	273	276	281	299	306
3. Konsumsi Pemerintah	2.003	2.268	2.528	2.907	3.196
4. PMTB	5.782	6.133	6.550	6.886	7.064
5. Perubahan Inventori	6	8	29	108	316
6. Net Ekspor Antar Daerah	-598	-556	-619	-788	-884
Total PDRB	14.078	15.176	16.255	17.429	18.558

Dari grafik 1, terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku, sedangkan dalam PDRB adh Konstan, pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

**Grafik 1**  
**Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010**  
**Menurut Pengeluaran, 2010 - 2014**



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), pengeluaran konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor (X), dan impor (M).

**Tabel 3**  
**Distribusi PDRB ADHB**  
**Menurut Pengeluaran, 2010 - 2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	46,96	46,19	46,18	44,89	44,27
2. Konsumsi LNPRT	1,94	1,79	1,68	1,69	1,577
3. Konsumsi Pemerintah	14,23	15,51	15,86	16,87	17,27
4. PMTB	41,07	40,24	37,96	36,57	35,59
5. Perubahan Inventori	0,04	0,07	0,24	0,57	1,43
6. Net Ekspor Antar Daerah	-4,25	-3,80	-1,92	-0,58	-0,13
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa selama periode tahun 2010-2014, berkisar 40-50 persen produk yang dikonsumsi di wilayah domestik, digunakan untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi akhir rumah tangga. PMTB yang menjadi gambaran investasi fisik di Kota Manado menduduki urutan kedua, di kisaran 30-40 persen. Konsumsi Pemerintah juga mempunyai peran yang besar, yakni sekitar 10-20 persen produk Kota. Net ekspor antar daerah negatif menunjukkan kondisi defisit, yaitu nilai impor antar daerah lebih tinggi dibandingkan nilai eksportnya. Hal ini berarti bahwa Kota Manado masih bergantung terhadap produk barang dan jasa dari luar daerah.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Manado dari tahun 2011-2014 secara rata-rata mencapai 7,15 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 7,80 persen (2011); 7,11 persen (2012); 7,22 persen (2013); dan 6,48 persen (2014). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011.

**Tabel 4**  
**Pertumbuhan PDRB ADHK 2010**  
**Menurut Pengeluaran, 2010 – 2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,59	6,24	7,06	6,80
2. Konsumsi LNPR	1,08	1,54	6,46	2,29
3. Konsumsi Pemerintah	13,25	11,45	14,99	9,94
4. PMTB	6,06	6,80	5,14	2,58
5. Perubahan Inventori	37,76	252,53	277,35	191,00
6. Net Ekspor Antar Daerah	-6,97	11,30	27,19	12,29
Total PDRB	7,80	7,11	7,22	6,48

### 3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 5**  
**Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga**  
**2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	6.612	7.323	8.194	8.920	9.937
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	6.612	7.047	7.487	8.016	8.561
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	46,96	46,19	46,18	44,89	44,27
Rata-rata konsumsi per kapita per tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	16.107	17.640	19.627	21.259	23.477
b. ADHK 2010	16.107	16.977	17.934	19.105	20.227
<u>Pertumbuhan</u>					
a. Konsumsi RT (%)	4,98	6,59	6,24	7,06	6,80
a. Konsumsi RT Per kapita per tahun (%)	4,02	5,40	5,64	6,53	5,87
Jumlah penduduk ( <i>org</i> )	410.481	415.114	417.483	419.596	423.257

Tabel 6 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2014, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), dan sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010-2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 46,96 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 44,27 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *ad-hoc* Berlaku maupun *ad-hoc* Konstan 2010. Pada tahun 2010, secara umum setiap penduduk di Kota Manado menghabiskan dana sekitar 16 juta rupiah setahun, untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun non makanan (*sandang*, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 17 juta rupiah (2011); 19 juta rupiah (2012); 21 juta rupiah (2013); dan menjadi 23 juta rupiah (2014).

Sementara itu, pada perkiraan *ad-hoc* Konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita tumbuh di kisaran 4-6 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2013, yakni sebesar 6,53 persen. Dengan kata lain, rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik *ad-hoc* Berlaku maupun *ad-hoc* Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kota Manado meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *ad-hoc* Konstan di tahun 2011 adalah sebesar 4,98 persen. Kemudian pada empat tahun berikutnya berturut-turut sebesar 6,59 persen (2011); 6,24 persen (2012); 7,06 persen (2013); dan 6,80 persen (2014). Sementara itu, konsumsi RT per kapita tumbuh 4,02 persen di tahun 2010; 5,40 persen ditahun 2011; 5,64 persen di tahun 2012; 6,53 persen di tahun 2013; dan 5,87 persen di tahun 2014. Terlihat bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “*riil*” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Secara rata-rata dari tahun 2010-2014, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Manado, bahwa konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan.

Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung berkurang, yaitu 37,49 persen (2010); 35,79 persen (2011); 35,58 persen (2012); 35,36 persen (2013); dan 33,99 persen (2014).

**Tabel 6**  
**Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga**  
**2010 - 2014**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, & Rokok	37,49	35,79	35,58	35,36	33,99
b. Pakaian & Alas Kaki	0,29	0,30	0,20	0,19	0,25
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,58	8,78	9,55	9,30	9,93
d. Kesehatan & Pendidikan	10,29	11,28	12,15	11,87	11,77
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, & Budaya	31,01	30,75	29,26	30,16	30,46
f. Hotel & Restoran	9,85	10,25	10,20	10,21	10,60
g. Lainnya	2,49	2,84	3,07	2,91	3,00
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan dan bukan makanan menunjukkan fluktuasi. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

**Tabel 7**  
**Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga**  
**2010 – 2014**

Kelompok Konsumsi	<i>(Persen)</i>			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Makanan, Minuman, & Rokok	2,19	4,89	4,70	5,37
b. Pakaian & Alas Kaki	7,85	1,75	5,24	1,68
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,17	9,18	8,93	9,35
d. Kesehatan & Pendidikan	5,60	5,81	8,99	10,89
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, & Budaya	8,19	5,20	8,28	5,01
f. Hotel & Restoran	13,06	9,07	9,65	9,04
g. Lainnya	22,24	17,35	1,44	12,48



### 3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan proporsinya terhadap PDRB menurut pengeluaran selama periode tahun 2010-2014 hanya berada di bawah 2 persen.

**Tabel 8**  
**Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT**  
**2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	273	284	299	336	352
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	273	276	281	299	306
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,94	1,79	1,68	1,69	1,57

Berdasarkan tabel 10, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010, selama periode tahun 2010-2014, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut digerakkan oleh aktivitas hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Perayaan Natal; kegiatan rapat tahunan organisasi baik skala daerah atau nasional dan juga Pilkada di daerah-daerah. Selain itu di tahun 2014 ada pelaksanaan pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Jumlah lembaga non profit yang melayani rumah tangga juga meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3 persen.

### 3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Manado serta perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

**Tabel 9**  
**Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah**  
**2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	2.003	2.458	2.813	3.352	3.877
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	2.003	2.268	2.528	2.907	3.196
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	14,23	15,51	15,86	16,87	17,27
Konsumsi Pemerintah per- kapita ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	4.879	5.796	6.867	8.155	9.380
b. ADHK 2010	4.879	5.571	6.421	7.347	8.012
<u>Pertumbuhan</u>					
a. Konsumsi pemerintah	15,76	13,25	11,45	14,99	9,94
a. Konsumsi per kapita	14,69	11,99	10,81	14,41	8,99
Jumlah penduduk ( <i>org</i> )	410.481	415.114	417.483	419.596	423.257

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 2 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya hampir mencapai 4 triliun rupiah.

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan di masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari 14,23 persen di tahun 2010 menjadi 17,27

persen di tahun 2014 atau tertinggi sepanjang lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per kapita adh Berlaku senilai 4,8 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 14,69 persen di tahun 2010; 11,99 persen (2011); 10,81 persen (2012); 14,41 persen (2013); dan 8,99 persen (2014).

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif, yakni sekitar 50-60%. Secara nominal dan proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah, pengeluaran konsumsi kolektif meningkat dari tahun ke tahun (lihat tabel 12). Proporsinya di tahun 2010 sebesar 54,01 persen dan terus meningkat hingga di tahun 2014 mencapai 59,99 persen.

**Tabel 10**  
**Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah**  
**2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (Belanja) Pemerintah					
a. Konsumsi Kolektif ( <i>Miliar Rp</i> )	1.082	1.299	1.555	1.963	2.326
(%)	54,01	52,87	55,29	58,56	59,99
b. Konsumsi Individu ( <i>Miliar Rp</i> )	921	1.158	1.258	1.389	1.551
(%)	45,99	47,13	44,71	41,44	40,01
Total Konsumsi ( <i>Miliar Rp</i> )	2.003	2.458	2.813	3.352	3.877
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	10,18	10,54	15,35	15,47	14,83
b. Konsumsi Individu	12,11	10,54	15,61	16,43	15,20
Total Konsumsi	11,06	10,54	15,47	15,91	15,00

### 3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 11**  
Perkembangan dan Struktur PMTB  
2010 – 2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	5.782	6.379	6.736	7.266	7.987
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	5.782	6.133	6.550	6.886	7.064
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	41,07	40,24	37,96	36,57	35,59
Struktur PMTB					
a. Bangunan ( <i>Miliar Rp</i> )	5.340	6.003	6.425	6.853	7.508
(%)	92,35	94,11	95,39	94,32	94,00
b. Non Bangunan ( <i>Miliar Rp</i> )	442	375	310	413	479
(%)	7,65	5,89	4,61	5,68	6,00
Total PMTB ( <i>Miliar Rp</i> )	5.782	6.379	6.736	7.266	7.987
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	0,84	7,87	6,93	5,19	2,34
b. Non Bangunan	42,38	(15,80)	4,91	4,38	6,40
Total PMTB	3,14	6,06	6,80	5,14	2,58

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2011-2014 berfluktuasi, yakni 3,14 persen (2010); 6,06 persen (2011); 6,80 persen (2012); 5,14 persen (2013) dan menjadi 2,58 persen (2014).

Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB berfluktuasi selama

periode 2010-2014 (tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut.

Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2010 tumbuh sebesar 0,84 persen dan terus bergerak hingga 2,34 persen pada tahun 2014. Sementara sub komponen non bangunan juga mengalami fluktuasi pertumbuhan dari 42,38 persen tahun 2010 hingga turun menjadi 6,40 persen (2014).

<http://manadokota.bps.go.id>

### 3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 12**  
**Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori**  
**2010 - 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	5,92	11,35	41,70	112,69	320,08
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	5,92	8,15	28,74	108,47	315,65
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,04	0,07	0,24	0,57	1,43

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Dilihat adh Berlaku, di tahun 2010 perubahan inventori tercatat sebesar 6 miliar rupiah, 11 miliar rupiah (2011), 41 miliar rupiah (2012), 112 miliar rupiah (2013), dan 320 miliar rupiah (2014). Proporsi komponen ini terhadap total PDRB juga sangat kecil, di bawah 2 persen.

### 3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah dalam negeri tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar daerah menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda **“positif”** berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri dan luar daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 13**  
**Perkembangan Ekspor 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	8.653	8.986	9.254	9.941	10.920
b. ADHK 2000 ( <i>Miliar Rp</i> )	8.653	8.973	9.081	9.338	9.902
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	61,46	56,69	52,15	50,03	48,66
Pertumbuhan Ekspor (%)	0,23	3,69	1,21	2,83	6,04

Secara total, nilai ekspor selama periode 2010-2014 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, ekspor Kota Manado tercatat senilai 8,6 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi 10,9 triliun rupiah di tahun 2014. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 8,6 triliun rupiah (2010); 8,9 triliun rupiah (2011); 9,1 triliun rupiah (2012); 9,3 triliun rupiah (2013); 9,9 triliun rupiah (2014).

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRIT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Manado. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Manado terhadap ekonomi atau produk daerah atau negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Manado di luar daerah, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 16 menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Kota Manado pada periode tahun 2010-2014 cenderung meningkat (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010).



Proporsi impor terhadap PDRB berada di kisaran 40-60 persen. Pada tahun 2010 proporsinya sebesar 65,17 persen, dan terus menurun menjadi 48,79 persen (2014).

Di sisi lain, secara riil nilai impor luar negeri tidak mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2010 sebesar 0,19 persen. Pada tahun berikutnya pertumbuhan impor luar negeri naik menjadi 3 persen. Di tahun 2013 dan 2014 kembali tumbuh positif menjadi 4,38 persen (2013) dan 6,53 persen (2014).

**Tabel 14**  
**Perkembangan Impor 2010 - 2014**

<b>U r a i a n</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	9.251	9.589	9.594	10.056	10.949
b. ADHK 2000 ( <i>Miliar Rp</i> )	9.251	9.529	9.700	10.126	10.787
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	65,71	60,49	54,07	50,61	48,79
Pertumbuhan Impor (%)	0,19	3,00	1,80	4,38	6,53

1. PDRB menurut Pengeluaran tahun 2010 s.d 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Manado pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2010-2014, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Manado terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

**Tabel 1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Pengeluaran, Kota Manado**

		<i>(Miliar Rp)</i>				
Komponen Pengeluaran		2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1.	Pengeluaran Kons. RT	6.612	7.323	8.194	8.920	9.937
1.a.	Makanan, Minuman, & Rokok	2.479	2.621	2.915	3.155	3.377
1.b.	Pakaian & Alas Kaki	19	22	16	17	25
1.c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RT	567	643	782	829	987
1.d.	Kesehatan & Pendidikan	680	826	996	1.059	1.169
1.e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, & Budaya	2.050	2.252	2.397	2.690	3.027
1.f.	Hotel & Restoran	651	751	836	911	1.053
1.g.	Lainnya	165	208	251	260	298
2.	Pengeluaran Kons. LNPRT	273	284	299	336	352
3.	Pengeluaran Kons. Pemerintah	2.003	2.458	2.813	3.352	3.877
3.a.	Konsumsi Kolektif	1.082	1.299	1.555	1.963	2.326
3.b.	Konsumsi Individu	921	1.158	1.258	1.389	1.551
4.	PMTB	5.782	6.379	6.736	7.266	7.987
4.a.	Bangunan	5.340	6.003	6.425	6.853	7.508
4.b.	Non-Bangunan	442	375	310	413	479
5.	Perubahan Inventori	5,92	11,35	41,70	112,69	320,08
6.	Net Ekspor (6.a – 6.b)	-598	-603	-340	-115	-29
6.a.	Ekspor	8.653	8.986	9.254	9.941	10.920
6.b.	Impor	9.251	9.589	9.594	10.056	10.949
PDRB		14.078	15.852	17.744	19.871	22.444

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

**Tabel 2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Pengeluaran, Kota Manado**

*(Miliar Rp)*

Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Kons. RT	6.612	7.047	7.487	8.016	8.561
1.a. Makanan, Minuman, & Rokok	2.479	2.533	2.657	2.782	2.931
1.b. Pakaian & Alas Kaki	19	21	21	22	23
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RT	567	619	676	736	805
1.d. Kesehatan & Pendidikan	680	718	760	828	918
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, & Budaya	2.050	2.218	2.333	2.527	2.653
1.f. Hotel & Restoran	651	737	803	881	961
1.g. Lainnya	165	201	236	240	270
2. Pengeluaran Kons. LNPRT	273	276	281	299	306
3. Pengeluaran Kons. Pemerintah	2.003	2.268	2.528	2.907	3.196
3.a. Konsumsi Kolektif	1.082	1.259	1.453	1.669	1.824
3.b. Konsumsi Individu	921	1.010	1.074	1.238	1.372
4. PMTB	5.782	6.133	6.550	6.886	7.064
4.a. Bangunan	5.340	5.760	6.159	6.479	6.630
4.b. Non-Bangunan	442	372	391	408	434
5. Perubahan Inventori	5,92	8,15	28,74	108,47	315,65
6. Net Ekspor (6.a – 6.b)	-598	-556	-619	-788	-884
6.a. Ekspor	8.653	8.973	9.081	9.338	9.902
6.b. Impor	9.251	9.529	9.700	10.126	10.787
PDRB	14.078	15.176	16.255	17.429	18.558

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

**Tabel 3**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Pengeluaran, Kota Manado**

Komponen Pengeluaran		(Persen)				
		2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran Kons. RT	46,96	46,19	46,18	44,89	44,27
1.a.	Makanan, Minuman, & Rokok	17,61	16,53	16,43	15,87	15,05
1.b.	Pakaian & Alas Kaki	0,14	0,14	0,09	0,09	0,11
1.c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RT	4,03	4,06	4,41	4,17	4,40
1.d.	Kesehatan & Pendidikan	4,83	5,21	5,61	5,33	5,21
1.e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, & Budaya	14,56	14,20	13,51	13,54	13,49
1.f.	Hotel & Restoran	4,63	4,74	4,71	4,58	4,69
1.g.	Lainnya	1,17	1,31	1,42	1,31	1,33
2.	Pengeluaran Kons. LNPR	1,94	1,79	1,68	1,69	1,57
3.	Pengeluaran Kons. Pemerintah	14,23	15,51	15,86	16,87	17,27
3.a.	Konsumsi Kolektif	7,68	8,20	8,77	9,88	10,36
3.b.	Konsumsi Individu	6,54	7,31	7,09	6,99	6,91
4.	PMTB	41,07	40,24	37,96	36,57	35,59
4.a.	Bangunan	37,93	37,87	36,21	34,49	33,45
4.b.	Non-Bangunan	3,14	2,37	1,75	2,08	2,14
5.	Perubahan Inventori	0,04	0,07	0,24	0,57	1,43
6.	Net Ekspor (6.a – 6.b)	-4,25	-3,80	-1,92	-0,58	-0,13
6.a.	Ekspor	61,46	56,69	52,15	50,03	48,66
6.b.	Impor	65,71	60,49	54,07	50,61	48,79
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

**Tabel 4**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Pengeluaran, Kota Manado**

Komponen Pengeluaran		(Persen)				
		2011*	2012*	2013*	2014**	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengeluaran Kons. RT	6,59	6,24	7,06	6,80	
1.a.	Makanan, Minuman, & Rokok	2,19	4,89	4,70	5,37	
1.b.	Pakaian & Alas Kaki	7,85	1,75	5,24	1,68	
1.c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RT	9,17	9,18	8,93	9,35	
1.d.	Kesehatan & Pendidikan	5,60	5,81	8,99	10,89	
1.e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, & Budaya	8,19	5,20	8,28	5,01	
1.f.	Hotel & Restoran	13,06	9,07	9,65	9,04	
1.g.	Lainnya	22,24	17,35	1,44	12,48	
2.	Pengeluaran Kons. LNPRT	1,08	1,54	6,46	2,29	
3.	Pengeluaran Kons. Pemerintah	13,25	11,45	14,99	9,94	
3.a.	Konsumsi Kolektif	16,35	15,47	14,83	9,27	
3.b.	Konsumsi Individu	9,61	6,43	15,20	10,84	
4.	PMTB	6,06	6,80	5,14	2,58	
4.a.	Bangunan	7,87	6,93	5,19	2,34	
4.b.	Non-Bangunan	-15,80	4,91	4,38	6,40	
5.	Perubahan Inventori	37,76	252,53	277,35	191,00	
6.	Net Ekspor (6.a – 6.b)	-6,97	11,30	27,19	12,29	
6.a.	Ekspor	3,69	1,21	2,83	6,04	
6.b.	Impor	3,00	1,80	4,38	6,53	
PDRB		7,80	7,11	7,22	6,48	

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. \_\_\_\_\_, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. \_\_\_\_\_, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. \_\_\_\_\_, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
11. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

16. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
19. \_\_\_\_\_, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Jl. PM Tangkilisan, Bumi Beringin, Manado 95113  
Telp. (0431) 863004, Email: [bps7171@bps.go.id](mailto:bps7171@bps.go.id)  
Website: [manadokota.bps.go.id](http://manadokota.bps.go.id)